

Penerapan Konsep Karang Kitri sebagai Langkah dalam Mewujudkan Pemerataan dan pertumbuhan Ekonomi menuju Kabupaten Batang Mandiri

M. Syamsul Rizal

rizalmuhammad.ma2009@gmail.com

Kusroh Lailiyah

hepilia@gmail.com

Kharisma Nawang Sigit

kharisma04337@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep penerapan karang kitri sebagai langkah dalam mewujudkan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi menuju batang mandiri. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep karang kitri ini pada dasarnya serupa dengan konsep perencanaan pembangunan kota modern yang terintegrasi, yang pada prinsipnya memaksimalkan potensi yang ada di sekitar yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, atau masyarakat di sekitar wilayah, melakukan pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Dengan adanya support data yang valid, antara sumber-sumber apa saja yang ada, berapa jumlah pastinya (*supply*), berapa jumlah yang akan menggunakan (*demand*), dapat dijadikan sebuah landasan bagi perencanaan dalam menata dan mengelola sumber daya yang ada di kabupaten Batang.

Kata kunci : karang kitri, pemerataan, pertumbuhan ekonomi

ABSTRACT

This study aims to find the concept of the application of coral chit as a step in realizing government and economic growth towards independent trunk. This research is a descriptive research. The method used in this research is qualitative method. The approach that researchers use is literature study. The results of this study indicate that the Karang Kitri concept is basically similar to the concept of integrated modern city development planning, which in principle maximizes the potential that is around that can be used to meet the needs of families, or communities around the region, carry out economic equality and improve welfare . With valid data support, what sources are available, how much is certain (*supply*), how much will be used (*demand*), can be used as a basis for planning in managing and managing the resources in Batang Regency.

Keywords : Karang Kitri, equity, economic growth

A. Latar Belakang

Era modern merupakan era persaingan yang menuntut sebuah kemandirian dan kreatifitas bagi semua Individu, Perusahaan, Daerah, maupun Negara. Saat ini individu-individu di seluruh dunia akan bersaing dalam berbagai bidang untuk dapat mewujudkan kesejahteraan mereka masing-masing. Demikian pula Perusahaan akan bersaing dengan

perusahaan, Daerah bersaing dengan daerah, bahkan Negara juga bersaing dengan Negara. Kita bisa melihat perkembangan zaman yang begitu cepat, contohnya di era 80an hingga 90an, negara-negara berlomba-lomba untuk melengkapi persenjataan mereka, karena dengan memiliki persenjataan yang kuat sebuah negara akan sangat disegani, dan hal itu juga akan berdampak pada sektor ekonomi hingga memunculkan sebuah slogan “*how strong your missile*” artinya siapa yang kuat akan menguasai dunia. Bergeser di era 1995an paradigma manusia sedikit demi sedikit bergeser seiring dengan perkembangan teknologi informasi telepon rumah mulai ditinggalkan digantikan dengan handphone yang memiliki mobilitas tinggi, komunikasi tidak lagi melulu menggunakan suara tapi mulai berkembang lewat *chatting* bahkan mulai berkembang teknologi yang bukan hanya melalui suara dan teks tulisan saja, tetapi kita dapat bertatap muka secara langsung dari jarak jauh, yang pada saat itu kita kenal dengan era baru “Era Internet”. Hari demi hari kebutuhan teknologi semakin meningkat, sehingga banyak bermunculan warung-warung internet (warnet) yang menggantikan posisi warung telepon di masa sebelumnya. Dalam perkembangannya, slogan yang muncul hari ini sudah tidak lagi “*how strong your missile*”, tapi bergeser menjadi “*how fast your modem*” dengan maksud apabila anda menguasai teknologi, maka anda akan menguasai dunia. Hari ini perangkat pendukung internet menjadi alat pokok dalam semua sistem dalam kehidupan manusia, dimulai dari manusia bangun dari tidur di pagi hari sampai tidur lagi di malam hari, kegiatan manusia tidak akan terlepas dari sarana informasi dan komunikasi.

Perkembangan internet menjadi sangat-sangat cepat, dari yang awalnya 2G menjadi 3G, kemudian 4G dan yang terakhir 5G. Lalu apa dampaknya dari percepatan kemajuan teknologi informasi ini bagi manusia? Kita akan coba flashback kembali, pada era awal komunikasi menggunakan jaringan 2G, komunikasi mulai dapat menghadirkan data dengan mengirimkan pesan gambar, video. Berlanjut lagi naik level pada munculnya 3G, kita mulai dapat berhubungan dengan manusia dibelahan dunia manapun secara live. Pertumbuhan sarana dan kapasitas internet menumbuhkan peluang bisnis baru yang berbasis e-commerce, situs-situs jual beli online mulai marak, yang pada akhirnya memaksa pemerintah untuk mengikuti perkembangan tersebut. Dengan adanya transaksi secara elektronik, mau tidak mau pemerintah membuat regulasi yang mengatur tentang itu, di Indonesia sendiri misalnya, draft Undang-undang tentang *E-commerce* mulai disusun pada tahun 2001. Dunia digital mulai bergerak maju dengan menghadirkan 4G, yang pada saat ini dapat kita lihat bisa memunculkan perusahaan-perusahaan besar yang berbasis *E-commerce*, yang sering disebut sebagai unicorn. Ya, hari ini memang eranya Unicorn yang mengandalkan hampir seluruh pusat bisnisnya pada media digital. Kita lihat saja ada perusahaan transportasi yang begitu besarnya dengan mitra tersebar hampir di seluruh Indonesia; siapa hari ini yang tidak kenal dengan Gojek dan Grab? Semua orang di Indonesia pasti mengenalnya. Perusahaan ini mampu mengantarkan anak muda kreatif menduduki peringkat tertinggi dalam segi ekonomi dan lifestyle tingkat puncak. Bisnisnya mampu membuat bingung bisnis transportasi *offline* yang terlihat kuno dan ribet. Kita lihat lagi perusahaan startup

lainnya, seperti Tokopedia, Shopee, dll. yang mampu menggeser perusahaan retail raksasa konvensional.

Kabupaten Batang merupakan salah satu daerah yang terletak wilayah Jawa Tengah, yang didalamnya memiliki spesifikasi sumber daya alam yang komplit, yang terdiri dari wilayah pesisir pantai sampai dengan wilayah pegunungan. Keistimewaan yang merupakan Anugerah Illahi dengan hasil alam yang sangat melimpah. Yang apabila dikoneksikan dengan kecanggihan teknologi informasi saat ini bisa membuat Batang menjadi sebuah daerah yang mampu tumbuh dan mandiri di segala bidang. Batang punya komoditas hasil perikanan laut, perikanan air tawar, peternakan, pertanian dan perkebunan serta kawasan industri yang ada di sepanjang kawasan pantura Batang. Melihat potensi sumber daya alam yang ada, jika dikelola dengan efektif dan efisien, masyarakat dapat memenuhi semua kebutuhan secara mandiri dan bisa menjadi masyarakat madani secara ekonomi dan sosial.

Pemerintah Kabupaten Batang seyogyanya bisa menjadi fasilitator, pendamping bagi masyarakat yang bergerak di berbagai sektor, baik dari usaha hulu sampai hilir. Dalam konsepsi Jawa tradisional kita mengenal adanya konsep atau gagasan karang kitri, yaitu sebuah gagasan dimana masyarakat jawa tradisional dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri (keluarga) dari hasil mengelola pekarangan sekitar rumah; dengan menanam sayuran, beternak ayam skala rumahan, ternak kambing, kelinci, kolam ikan, dan lainnya. Dengan demikian, masyarakat jawa tradisional tidak terlalu bergantung dengan orang lain terkait dengan kebutuhan pokoknya, atau bisa dikatakan telah swasembada pangan.

Konsep Karang Kitri ini jika diterapkan di Kabupaten Batang dengan Pemerintah sebagai pengelola serta fasilitator, dan masyarakat sebagai pelaku usaha, kita bisa menciptakan kabupaten Batang mandiri, terlebih lagi dalam kondisi saat ini yang telah didukung dengan adanya teknologi informasi yang sudah canggih. Dengan adanya komunikasi yang luas, dan distribusi yang baik, masyarakat pegunungan bisa dengan mudah menikmati hasil laut, masyarakat pesisir juga bisa dengan mudah menikmati sayuran dan buah-buahan segar khas pegunungan. Yang terpenting akan tercipta sebuah sistem ekonomi mandiri, yang disebabkan oleh besarnya perputaran uang yang ada di wilayah Batang. Sehingga “devisa” bagi kebutuhan pokok tidak keluar kemana-mana, dan hanya berputar di masyarakat Batang. Sebuah sistem ekonomi yang indah, dari masyarakat Batang untuk masyarakat Batang menuju cita-cita Batang makmur dan mandiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan “bagaimanakah konsep penerapan karang kitri sebagai langkah dalam mewujudkan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi menuju batang mandiri?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep penerapan karang kitri sebagai langkah dalam mewujudkan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi menuju batang mandiri.

D. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri terutama berkaitan dengan pemerintahan umum maupun pembangunan, yang sebelumnya diurus pemerintahan pusat. Untuk itu, selain diperlukan kemampuan keuangan, diperlukan juga adanya sumber daya manusia berkualitas, sumber daya alam, modal, dan teknologi. Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Josep Riwu Kaho, mengartikan otonomi sebagai peraturan sendiri dan pemerintah sendiri. Selanjutnya, bahwa otonomi daerah adalah daerah yang diberi wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur urusan-urusan tertentu. Lanjut Josep Riwu Kaho, bahwa suatu daerah otonom harus memiliki atribut sebagai berikut:³

- Mempunyai urusan tertentu yang merupakan urusan yang diserahkan pemerintah pusat;
- Memiliki aparatur sendiri yang terpisah dari pemerintah pusat, yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya;
- Urusan rumah tangga atas inisiatif dan kebijakan daerah;
- Mempunyai sumber keuangan sendiri, yang dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga itu sendiri.

Dari segi materiil, otonomi daerah mengandung makna sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan yang bersanding dengan prinsip kesejahteraan dan sistem pemencaran kekuasaan menurut dasar negara berdasarkan hukum.¹ pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggungjawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Nyata berarti pemberian otonomi pada daerah didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan, tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan dinamis didasarkan pada kondisi dan perkembangan pembangunan dan bertanggungjawab adalah pemberian otonomi yang¹² diupayakan untuk memperlancar pembangunan di pelosok tanah air.

2. Teori Distribusi Pendapatan

Banyak perhatian yang telah diberikan terhadap bagaimana distribusi pendapatan berubah dalam masa pembangunan. Simon Kuznets

¹ Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum FH UII, Jogjakarta, 2001.hlm.57.

(1995) membuat hipotesis adanya kurva U terbalik (*inverted U curve*) bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan semakin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan semakin merata. Menurut Kuznets “pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya”. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan-kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Menurut Kuznets ada enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi, diantaranya sebagai berikut: Pertama, tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kedua, tingkat kenaikan produktivitas faktor total yang tinggi. Ketiga, tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi. Keempat, tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi. Kelima, adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru. Keenam, terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sepertiga bagian penduduk dunia. Menurut teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh

Adam Smith “*An Inquiry into the nature and causes of the wealth of the nation*”, teorinya yang dibuat dengan teori *the invisible hands*. Pertumbuhan ekonomi ditandai oleh adanya dua faktor yang saling berkaitan, yaitu; pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output total. Pertumbuhan output yang akan dicapai dipengaruhi oleh 3 komponen berikut ini:

a. Sumber-sumber yang berasal dari alam

Menurut Smith, Sumber yang berasal dari alam diinterpretasikan sebagai ketersediaan tanah yang dapat digunakan sebagai sarana produksi. Sumber daya alam yang tersedia merupakan kebutuhan yang paling mendasar dari kegiatan produksi masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang tersedia menjadi batas maksimum bagi pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Artinya jika sumber daya alam yang ada di wilayah kabupaten Batang belum digunakan secara maksimal atau sepenuhnya, maka dapat dilakukan upaya-upaya yang berguna dalam mendukung pertumbuhan output. Pertumbuhan output ini akan terhenti apabila semua sumber daya yang ada sudah digunakan secara optimal.

b. Tenaga kerja (pertumbuhan penduduk)

Tenaga kerja diinterpretasikan oleh Adam Smith sebagai jumlah penduduk. Karena sumber daya manusia memiliki peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga

kerja dari suatu masyarakat. Smith memandang tenaga kerja merupakan salah satu input dalam proses produksi dan pembagian kerja, dan spesialisasi merupakan salah satu kunci penting dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja.

c. Akumulasi modal yang dimiliki.

Jumlah persediaan modal memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Persediaan modal dapat diidentikkan sebagai “dana pembangunan”, cepat lambatnya pembangunan ekonomi tergantung pada ketersediaan “dana pembangunan” tersebut. Selain itu persediaan modal merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Perannya sangat sentral dalam pertumbuhan output. Jumlah dan pertumbuhan output ini tergantung pada laju pertumbuhan persediaan modal.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan gagasan atau pemikiran penulis tentang kajian norma yang dikaitkan dengan penerapan norma-norma tersebut di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku di masyarakat, serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena tertentu (Moh. Nazir, 1988). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah

studi pustaka. Berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat kemudian di analisis secara kualitatif berdasarkan teori-teori yang relevan.

F. Pembahasan

Sejak otonomi daerah telah diterapkan di Indonesia tahun 2001, yang ditandai dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian disempurnakan dengan UU No. 32 Tahun 2004. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa desentralisasi harus mencakup dua hal yang bersifat perlu diutamakan: Pertama, adanya pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu sebuah pembagian kewenangan otonom yang lebih luas. Kedua, memberikan tanggungjawab kepada daerah untuk mengelola potensi yang dimiliki.² Amanat undang-undang tentang otonomi daerah mengandung arti bahwa apabila suatu daerah sudah diberi kewenangan untuk mengelola potensinya, maka daerah tersebut secara otomatis mendapat tanggungjawab untuk mengawasi, mengelola dan memanfaatkan potensi tersebut. Otonomi daerah diharapkan dapat menjadi sumber bagi pembangunan yang lebih efektif, lebih efisien, dan kemudian dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah pada khususnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Widmalm bahwa dari sisi ekonomi, otonomi daerah melahirkan pemerintahan yang efisien, efektif, anti-korupsi dan memacu percepatan pertumbuhan ekonomi.³ Saat ini daerah dipandang sebagai motor penggerak utama dalam

² Bayu Mitra Adhyatma Kusuma, “Pembangunan Terintegrasi Dalam Mewujudkan KotaPariwisata Bertaraf Internasional: Studi Kasus Dikabupaten Banyuwangi Jawa Timur”*Jkmp* (Issn. 2338-445x), Vol. 2, No. 2, September 2014, 103-220.

³*Ibid.*

pembangunan berkelanjutan di Indonesia, sehingga daerah dipandang sangat penting bagi masa depan Indonesia secara keseluruhan. Untuk itu pembangunan terintegrasi semakin dibutuhkan, karena kompleksitas isu, masalah, dan sumber daya yang ada saat ini.

Pembangunan terintegrasi dapat menjadi solusi alternatif dalam mengatasi masalah dengan menyediakan solusi yang komprehensif dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Batang sebagai sebuah kota yang mandiri yang memiliki potensi sumberdaya yang istimewa; sehingga dapat diwujudkan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pokok, yang dipenuhi dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta perikanan yang merupakan hasil laut, maupun sektor industri dan perdagangan. Kemudian Kabupaten Batang perlahan-lahan mampu mewujudkan cita-cita dalam menciptakan industri pariwisata dengan kelas internasional yang didukung oleh kemapanan struktur sosial ekonomi masyarakat yang menjadi sebuah kearifan lokal khas Kabupaten Batang. Dengan demikian diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus dapat mengangkat citra kabupaten Batang dalam skala Nasional maupun internasional.

Potensi Kabupaten Batang seperti yang tercatat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor peternakan menunjukkan sebagai berikut; kuda 89 ekor, sapi perah 92 ekor, sapi potong 21.775 ekor, kerbau 1.395 ekor, kambing 80.890 ekor, domba 31.920 ekor, dan Babi 5805 ekor. Sementara potensi perkebunan besar dikuasai oleh beberapa sektor; perkebunan kelapa dengan hasil mencapai

6.043 ton, cengkeh 4.128 ton, kelapa 6.043 ton, dengan produksi padi mencapai 216.641 ton. Jumlah hasil tanaman pokok, hortikultura, perkebunan dan peternakan serta perikanan pada dasarnya dapat kita hitung rasionya dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di kabupaten Batang. Jumlah penduduk di kabupaten Batang berdasarkan data BPS tahun 2015 mencapai 743.090 jiwa.⁴ Artinya kita bisa melakukan sebuah simulasi rasio kebutuhan pokok dari kehidupan sehari-hari warga masyarakat kabupaten Batang dibandingkan dengan hasil bumi yang dihasilkan. Misalnya untuk kebutuhan beras, jika di buat rata-rata kebutuhan makan setiap orang dalam satu hari sebesar 0,5 kilogram, maka dalam satu tahun mencapai 182 kilogram. Kita bisa perhitungkan jumlah penduduk 743.090 jiwa dikalikan dengan 182 kilogram per jiwa, maka dalam setahun kebutuhan rata-rata beras di Kabupaten Batang mencapai 135.242.380 kilogram, atau sebesar 135.242,4 ton beras. Sedangkan produksi padi di Kabupaten Batang dalam bentuk gabah sebesar 216.641 ton, jika dikonversi dalam bentuk beras yaitu 108.320,5 ton dalam setahun, ini artinya Kabupaten Batang masih memiliki minus sebesar 26.921,9 ton beras. Jumlah ini sebenarnya tidak terlalu besar, dan mampu diupayakan lebih maksimal oleh semua pihak terkait, guna menciptakan Kabupaten Batang swasembada beras. Dengan swasembada, artinya masyarakat Batang tidak perlu lagi membeli beras dari tempat lain. Demikian juga, upaya untuk pemenuhan kebutuhan di segala sektor pokok, terutama sektor pangan.

Konsep karang kitri ini pada dasarnya serupa dengan konsep

⁴ Bps.go.id

perencanaan pembangunan kota modern yang terintegrasi, yang pada prinsipnya memaksimalkan potensi yang ada di sekitar yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, atau masyarakat di sekitar wilayah, melakukan pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Dengan adanya support data yang valid, antara sumber-sumber apa saja yang ada, berapa jumlah pastinya (*supply*), berapa jumlah yang akan menggunakan (*demand*), dapat dijadikan sebuah landasan bagi perencanaan dalam menata dan mengelola sumber daya yang ada di Kabupaten Batang. Misalnya, dalam sehari berapa banyak konsumsi sayuran dan jenisnya apa saja, berapa kebutuhan daging ayam, daging sapi, daging kambing, hasil perikanan laut, hasil perikanan darat dalam sehari. Jika *demand* sudah kita dapatkan datanya, maka kita juga harus mendata/menginventarisasi produsennya atau *supliyer*-nya sehingga kemudian dapat mengupayakan bagaimana cara memenuhi kebutuhan harian, bulanan, bahkan kebutuhan tahunannya, serta mengupayakan untuk dapat dipenuhi dari dalam Kabupaten Batang sendiri.

Data yang diperoleh kemudian bisa dijadikan sebagai sebuah pijakan awal dalam mengambil sebuah kebijakan, yang merupakan wujud nyata dari peran aktif pemerintah dalam mendorong dan mewujudkan perekonomian yang makmur dan mandiri. Didukung dengan adanya kemajuan teknologi yang ada saat ini memungkinkan untuk bisa ter-*update* data secara *realtime*, tentang komoditas dan persebarannya, serta berapa kebutuhannya. bagi pemerintah sebagai *stakeholder* utama dibantu dengan *stakeholder* pendukung seperti BUMD maupun swasta dengan program CSRnya dalam memenuhi amanat publik, sebagai kepanjangan tangan dan

harapan masyarakat dalam mencapai sebuah kehidupan yang layak yang sesuai dengan *standard* hidup layak.

Pengembangan ekonomi di kawasan pedesaan dapat dijadikan sebuah pendekatan baru perekonomian yang didalamnya terdapat hubungan antara proses distribusi hasil produksi yang berasal dari desa dengan sistem ekonomi pasar yang umumnya ada di kota untuk memacu kegiatan ekonomi yang berada di pedesaan dan sekaligus dapat menciptakan harga yang lebih menguntungkan sebagai sebuah nilai tambah bagi petani di pedesaan maupun bagi konsumen di perkotaan, yang disebabkan oleh adanya rantai distribusi yang singkat. Pengembangan ekonomi kawasan pedesaan yang dilakukan secara komprehensif dapat meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan dan peluang usaha, serta menumbuhkan strategi baru dalam menjaga agar sebagian besar peluang untuk memperoleh pendapatan dan pemerataan ekonomi tetap berada di kawasan pedesaan.

Dalam pembangunan selalu diperlukan sebuah proses perubahan struktur sosial, kelembagaan nasional, kelembagaan daerah, percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan, karena pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Secara filosofis, pembangunan diartikan sebagai upaya yang bersifat sistematis dan berkelanjutan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan beragam alternatif yang bersifat humanis dalam pencapaian aspirasi masyarakat. Dengan demikian, Kabupaten Batang harus mengenal dengan baik potensi yang dimilikinya, serta dapat memberdayakan berbagai sumber daya

tersebut sebagai dasar dalam pembangunannya. Pembangunan perekonomian pedesaan harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta infrastruktur yang tersedia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Selanjutnya dapat disusun perencanaan pembangunan kawasan pedesaan yang pada hakikatnya sejalan dan selaras dengan konsep karang kitri yang dipercaya oleh masyarakat Jawa dalam mencapai kemandirian ekonomi, yang kemudian diadopsi dan digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan. Perencanaan tersebut menekankan pada pembangunan berbasis sumber daya lokal yang memiliki potensi dalam menciptakan peluang pekerjaan dan memacu kegiatan perekonomian baru berbasis lokal. Pengembangan ekonomi di kawasan pedesaan diarahkan untuk mencapai tiga tujuan utama, yaitu penciptaan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, berkurangnya jumlah penduduk miskin, dan terwujudnya mata rantai kehidupan yang berkelanjutan (*sustainable livelihood*). Dalam upaya untuk mengembangkan ekonomi di kawasan pedesaan, terdapat beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan, diantaranya yaitu meningkatkan kemampuan produsen di kawasan pedesaan, agar mampu bersaing dengan produk yang berasal dari luar kawasan pedesaan yang diharapkan mampu memperbaiki kualitas produksi dan memperbesar peluang distribusi yang harapannya dapat terserap pasar dan bahkan menguasai pasar lokal. Kedua, memperbaiki kerjasama antar *stakeholder* agar dapat saling mendukung dan memperkuat proses produksi serta

distribusi. Ketiga, mengalokasikan sumber daya kepada kelompok masyarakat yang berpotensi untuk berkembang, dan terus memberdayakan masyarakat yang masih belum menemukan sektor usaha, serta membuat suatu pusat perdagangan sebagai media interaksi antar kelompok usaha dengan pasar. Keberhasilan proses pengembangan ekonomi di kawasan pedesaan, hendaknya memperhatikan komponen-komponen pendukung. Komponen lingkungan (*environment*) ataupun komponen infrastruktur (*instrument*) desa memiliki peran dalam pencapaian tujuan pengembangan perekonomian yang diharapkan.⁵

Pengembangan ekonomi di kawasan pedesaan berorientasi memperkuat posisi produksi barang dan jasa hasil pertanian, peternakan, perikanan. Pengembangan ini bertujuan untuk membentuk basis kolektif masyarakat. Melakukan upaya dalam meningkatkan keterampilan dan kapasitas bagi nelayan, petani, peternak, dan pelaku usaha mikro, serta menyiapkan sarana bagi keterlibatan mereka dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan yang ada di lingkup daerah. Produsen di pedesaan merupakan kelompok yang paling lemah dan memerlukan dukungan, karena umumnya kelompok ini merupakan kelompok yang berpendidikan rendah, dengan tingkat ekonomi lemah. Agar dapat tumbuh dan merata, kelompok produsen di pedesaan ini baiknya memiliki asosiasi atau organisasi yang bersifat sektoral, yang dapat dibangun dan dikembangkan melalui dua pendekatan. Pertama, dengan meningkatkan kapasitas organisasi

⁵Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si,
<https://fisip.unla.ac.id/materi/E-Learning/Minggu%20Ke-4/Ilmu%20Pemerintahan/5.%20Jumat/Soni%20Gunanawan%20Somali%2C%20Drs.%2C%20M.Si/teori%20pembangunan.pdf>

produsen agar memiliki posisi kuat dan jelas dalam kerjasama kemitraan, dan kedua, mengembangkan ketrampilan untuk menjamin peningkatan dan kualitas produksi dalam sektoral mereka.

Konsep pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Batang harus mampu memfasilitasi dan mendukung masyarakat miskin dengan mengedepankan beberapa prinsip pokok, yaitu: Pertama, berani berfokus pada upaya peningkatan sumber daya manusia dan kapital sosial penduduk miskin, terlebih dalam sektor produktif. Kedua, kebijakan dan pelayanan yang menghasilkan oleh pemerintah daerah harus dapat menjamin tersedianya kebutuhan dasar masyarakat secara luas dan berkelanjutan (pangan, air bersih, perumahan, kesehatan dan pendidikan). Ketiga, membuka peluang bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pekerjaan. Keempat, meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah dalam hal memudahkan akses masyarakat miskin terhadap sumber daya ekonomi. Dan yang kelima, melaksanakan program pembangunan yang ramah lingkungan, sehingga tidak merusak ekosistem yang ada yang selama ini menjadi penopang perekonomian masyarakat, dengan cara menjaga dan meminimalisir dampak pencemaran industri.

G. Kesimpulan

Konsep karang kitri ini pada dasarnya serupa dengan konsep perencanaan pembangunan kota modern yang terintegrasi, yang pada prinsipnya memaksimalkan potensi yang ada di sekitar yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, atau masyarakat di sekitar wilayah, melakukan pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Dengan adanya support data

yang valid, antara sumber-sumber apa saja yang ada, berapa jumlah pastinya (*supply*), berapa jumlah yang akan menggunakan (*demand*), dapat dijadikan sebuah landasan bagi perencanaan dalam menata dan mengelola sumber daya yang ada di kabupaten Batang. Pengembangan ekonomi di kawasan pedesaan berorientasi memperkuat posisi produksi barang dan jasa hasil pertanian, peternakan, perikanan. Pengembangan ini bertujuan untuk membentuk basis kolektif masyarakat. Melakukan upaya dalam meningkatkan keterampilan dan kapasitas bagi nelayan, petani, peternak, dan pelaku usaha mikro, serta menyiapkan sarana bagi keterlibatan mereka dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan yang ada di lingkup daerah. Pengembangan ekonomi kawasan pedesaan yang dilakukan secara komprehensif dapat meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan dan peluang usaha, serta menumbuhkan strategi baru dalam menjaga agar sebagian besar peluang untuk memperoleh pendapatan dan pemerataan ekonomi tetap berada di kawasan pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum FH UII, Jogjakarta, 2001
- Bayu Mitra Adhyatma Kusuma, "Pembangunan Terintegrasi Dalam Mewujudkan Kota Pariwisata Bertaraf Internasional: Studi Kasus Dikabupaten Banyuwangi Jawa Timur" Jkmp (ISSN. 2338-445X), Vol. 2, No. 2, September 2014, 103-220
- Drajat Tri Kartono & Hanif Nurcholis, <https://fisip.unla.ac.id/materi/E->

[Learning/Minggu%20Ke4/Ilmu%20Pemerintahan/5.%20Jumat/Soni%20Gunawan%20Somali%2C%20Drs.%2C%20M.Si/teori%20pembangunan.pdf](#)

Hariyanto dan Tukidi, “Konsep Pengembangan Wilayah Dan Penataan Ruang Indonesia Di Era Otonomi Daerah”, Jurnal Geografi Volume 4 No. 1 Januari 2007

<https://batangkab.bps.go.id/>

Suparmini, “Keterkaitan Desa-Kota: Sebagai Alternatif Pembangunan Perdesaan”, Geomedia, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2007

Wildan Arifianto & Imam Setiyono, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Distribusi Pendapatan Di Indonesia”, Universitas Negeri Surabaya

Wirdatul ‘Aini, “Pembangunan Ekonomi Kawasan Pedesaan Berorientasi Pemberdayaan Perempuan”, Dalam Kompetensi Pendamping Pembangunan Desa, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Luar Sekolah, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang 2016